

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2016

No. Publikasi : **7472.1801**
Katalog BPS : **4102004.7472**
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv +104 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kota Baubau

Gambar Kover :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Baubau

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Baubau

Dicetak Oleh :
UD. Syahid Kendari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Baubau 2016 merupakan publikasi pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Baubau. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Baubau, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Baubau



Sudirman K, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
Singkatan dan Akronim	xii
Bab 1 Kependudukan	1
Bab 2 Kesehatan dan Gizi	15
Bab 3 Pendidikan	29
Bab 4 Ketenagakerjaan	43
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi	53
Bab 6 Perumahan dan Lingkungan	59
Bab 7 Kemiskinan	69
Lampiran	75
Sumber Data	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubu dan Rasio Jenis Kelamin, 2012-2016.....	5
1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2016.....	7
1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2016.....	9
1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Baubau, 2015 - 2016	11
1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 - 2016.....	14
KESEHATAN DAN GIZI	
2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (e_0) di Kota Baubau, 2015-2016	19
2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Baubau, 2015 - 2016.....	20
2.3 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Mendapat ASI Eksklusif dan Lamanya Disusui di Kota Baubau, 2015 - 2016	22
2.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Baubau, 2015 - 2016.....	23
2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin	
<i>Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Baubau 2016</i>	vii

Menurut Penolong Persalinan di Kota Baubau, 2015 - 2016	25
2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Baubau, 2015 - 2016.....	26
2.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kota Baubau, 2016... ..	28

PENDIDIKAN

3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Baubau, 2014-2016	35
3.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2015-2016.....	36
3.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi dan Jenis Kelamin yang Dimiliki Tahun 2015-2016....	37
3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Penduduk berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2016 ...	39
3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas, 2013/2014-2016/2017	41

KETENAGAKERJAAN

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau Menurut Jenis Kelamin, 2014 - 2015	47
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Baubau Menurut Tingkat Pendidikan, 2015	49
4.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2014 - 2015	50

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran,	
---	--

2015 - 2016.....	56
5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran Per Kapita I(ribu/rupiah) 2015 - 2016.....	58

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2014 dan di Kota Baubau, 2015-2016	63
6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Luas lantai per-kapita,205-2016.....	64
6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan,2015 - 2016	66
6.4 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Perumahan,2015 -2016	67

KEMISKINAN

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau, 2012-2016.....	72
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2015-2016	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Angka Beban Ketergantungan di Kota Baubau, 2014-2016	8
1.2 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2015 - 2016.....	10
1.3 Persentase Partisipasi KB Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 tahun di Kota Baubau	21
2.1 Angka Kesakitan Kota Baubau (%), 2015 - 2016	18
2.2 Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Masih Diberikan ASI, 2016	21
2.3 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi lengkap, 2016	23
3.1 Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Baubau, 2014-2016	33
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Baubau, 2014-2016	34
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Baubau, 2014 - 2015	46
4.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Umur 15+ Tahun Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (ribu jiwa), 2015.....	48
5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Baubau Menurut Jenis Pengeluaran, 2015 - 2016.....	55
6.1 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016	65

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

KEPENDUDUKAN



1



Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menunjang dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena dari penduduk berkualitas memungkinkan untuk bisa mengolah potensi sumber daya alam yang ada dengan baik, tepat, dan efisien guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Indikator kualitas atau mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti; pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana



kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk di Kota Baubau tahun 2016 tercatat 158.271 jiwa atau 6,20 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2,55 juta jiwa. Jumlah penduduk Kota Baubau mengalami penambahan kurang lebih 3.394 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 154.877 jiwa. Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kota Baubau saat ini mengalami peningkatan kurang lebih 11 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Baubau telah mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 15.695 jiwa.

Kegunaan laju pertumbuhan penduduk adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 tercatat sebesar 2,41 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kota Baubau sebesar 2,01

persen.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubau dan Rasio Jenis Kelamin, 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	142.576	2,02	94,59
2013	145.427	2,01	97,56
2014	151.485	2,24	97,50
2015	154.877	2,01	97,34
2016	158.271	2,41	97,66

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada tahun 2016 penduduk Kota Baubau sebesar 6,20 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kabupaten Konawe.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Baubau pada tahun 2016 sebesar 97,66. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Baubau lebih sedikit bila dibanding penduduk perempuan. Bila dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan kelurahan dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kelurahan Batupoaro dan Lea-Lea yaitu sebesar 94 dan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kelurahan Wolio yaitu 101.



Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kota Baubau. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Selama ini persebaran penduduk Baubau terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
Betoambari	600	11,91
Murhum	3 658	14,07
Batupoaro	17 822	18,92
Wolio	1 304	27,67
Kokalukuna	1 148	12,22
Sorawolio	74	5,18
Bungi	139	5,19
Lea-lea	230	4,85
Baubau	540	100,00

Kecamatan Batupoaro merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau yaitu 17.822 jiwa/Km².

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035



Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa di beberapa kecamatan yang sebagian besar wilayah kelurahannya berstatus pedesaan memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan yang berstatus perkotaan. Dimana Kecamatan yang memiliki sebagian besar kelurahannya berstatus pedesaan adalah Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea, sedangkan kecamatan lainnya sebagian besar bahkan seluruh kelurahannya bersatatus perkotaan. Kecamatan Batupoaro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau sekitar 17.882 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Sorawolio memiliki kepadatan paling rendah sekitar 74 jiwa per km². Kepadatan penduduk di seluruh kecamatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum dan tidak produktif lagi.



Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2014-2016 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 angka beban tanggungan di Kota Baubau sebesar 56,08 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 penduduk usia belum dan tidak produktif. Sampai tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk mengalami penurunan menjadi 55,30 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 55 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda



(0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 32,13 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 31,90 persen pada tahun 2015. Hingga tahun 2016 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 31,65 persen.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2016

Tahun	0-14 Tahun (%)	15-64 Tahun (%)	65 Tahun + (%)	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	32,13	64,07	3,80	56,08
2015	31,90	64,23	3,88	55,70
2016	31,65	64,39	3,96	55,30

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada Tabel 1.3. juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Baubau masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 56,08 persen pada tahun 2014 dan kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 55,70 persen dan kembali menurun menjadi 55,30 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Baubau menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi

penduduk usia lanjut(65 tahun ke atas) semakin



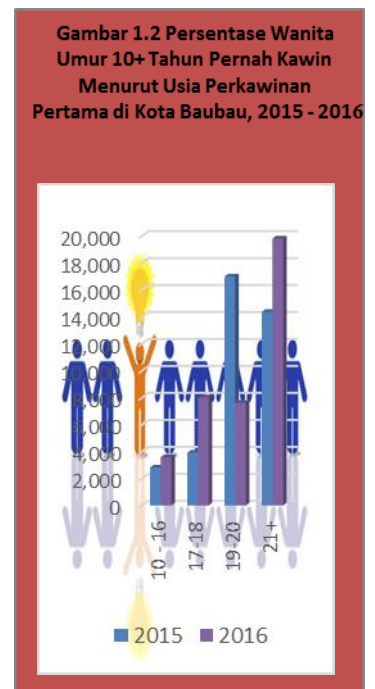
bertambah dari 3,80 persen pada tahun 2014 menjadi 3,88 persen pada tahun 2015 dan 3,96 persen pada tahun 2016.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016, persentase wanita di Kota Baubau berusia 10-16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 9,16 persen



atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama masih rendah, karena pada usia 10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Tahun 2016 sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya mengalami peningkatan dari 37,69 persen pada tahun 2015 naik menjadi 50,74 persen pada tahun 2016. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan 15-pertama pada usia 19-20 tahun mengalami penurunan di tahun 2016 dari 44,62 persen menjadi 19,55 persen.

Persentase tertinggi wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di Kota Baubau pada tahun 2016 berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu 36,44 persen.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Baubau, 2015 - 2016

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
10-16	7,40	9,16
17-18	10,28	20,55
19-20	44,62	19,55
21 +	37,69	50,74

[Diolah dari Hasil Susenas]



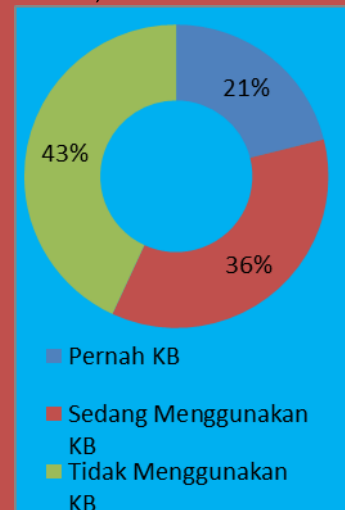
Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB dengan berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB masih rendah yaitu sebesar 38,39 persen pada tahun 2015 dan 35,81 persen pada tahun 2016.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko

Gambar 1.3 Persentase Partisipasi KB Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kota Baubau ,2016.





efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2015 penggunaan suntikan mencapai 43,46 persen dan meningkat menjadi 56,28 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penggunaan pil mengalami penurunan dari 39,38 persen pada tahun 2015 menjadi 33,16 persen pada tahun 2016.

Tahun 2016 jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaanya adalah kondom/ karet dan meysui serta alat Kb lainnya masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen. Sedangkan MOW/ Tubektomi, Susuk KB, dan Pantang berkala persentase penggunaannya di bawah 5 persen.

Beberapa alat/cara KB yang mengalami sedikit peningkatan pengguna selama tahun 2015-2016 adalah MOW/Tubektomi, dan Pantang berkala/kalender masing – masing sebesar 3,02 dan 3,38 persen.



Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 - 2016.

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Alat/Cara KB	Peran	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	0,96	3,02
MOP/Vasektomi	0,00	0,00
AKDR/IUD/Spiral	4,92	0,00
Suntikan	43,46	56,28
Susuk KB/Norplant/Implanon/alwalit	8,69	3,05
Pil	39,38	33,16
Kondom/karet	0,19	0,38
Intravag/tissue/kondom wanita	0,00	0,00
Pantang berkala/Kalender	0,88	3,38
Menyusui dan Lainnya	0,10	0,73
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	38,39	35,81

Kesehatan dan Gizi



2



KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau.



Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata – rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat mencerminkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup (e_0) masyarakat di Kota Baubau tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 yaitu dari 70,43 tahun menjadi 70,47 tahun. Hal ini dapat menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Baubau.

Gambar 2.1 Angka Kesakitan (%), di Kota Baubau, 2015 - 2016





KESEHATAN DAN GIZI

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan terakses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (e_0) di Kota Baubau, 2015 - 2016

Tahun	Angka Harapan Hidup (e_0)
(1)	(2)
2015	70,43
2016	70,47

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tahun 2016 tercatat terdapat 4 rumah sakit, 2 rumah sakit bersalin, 17 puskesmas, 149 posyandu, 3 klinik/balai kesehatan dan 15 polindes. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 terjadi penurunan jumlah fasilitas kesehatan sebesar 2,06 persen dikarenakan terjadi penurunan jumlah posyandu tetapi terdapat penambahan jumlah rumah sakit.

Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari angka kesakitan (morbiditas). Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.



Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Baubau mencapai 67,36 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 14,44 persen. Selain angka kesakitan lamanya sakit juga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2016 tidak dapat dikatakan sebagai penurunan kondisi kesehatan penduduk jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2015 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari dan berkurang menjadi kisaran 5 hari pada tahun 2016.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Baubau, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

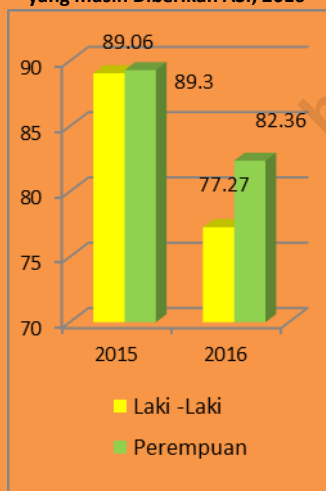
Daerah Tempat Tinggal	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit (Hari)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki- laki	13,76	67,70	7	5
Perempuan	15,11	67,05	5	4
Total	14,44	67,36	6	5

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Hasil olah Susenas 2016 menunjukkan bahwa persentase bayi laki-laki usia 0-23 bulan yang diberikan ASI lebih sedikit dari pada bayi perempuan yaitu 77,27 persen sedangkan bayi perempuan sebesar 82,36 persen

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Berusia 0 -23 Bulan yang masih Diberikan ASI, 2016



Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/ minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.



Tabel 2.3 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Mendapat ASI Eksklusif dan Lamanya Disusui di Kota Baubau, 2015 - 2016

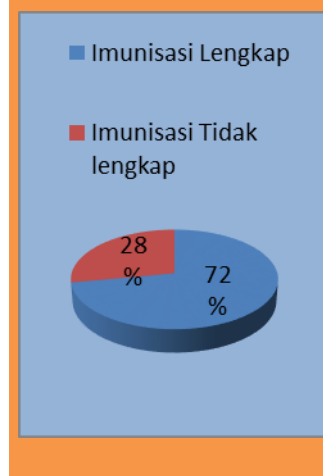
[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Persentase Anak Usia 0 -23 Bulan yang Mendapat Asi (%)				Rata-rata Lama Disusui (bulan)
	0 -11	12 -15	16 -19	20 -23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki – laki					
2015	69,21	19,03	6,96	4,80	9
2016	68,46	11,51	12,03	8,00	9
Perempuan					
2015	52,30	19,27	17,50	10,93	10
2016	52,23	24,62	13,90	9,24	11

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah balita paling banyak diberikan ASI pada usia 0 -11 bulan sedangkan usia 12 bulan ke atas pemberian ASI sudah mulai berkurang. Rata-rata pemberian ASI pada bayi laki-laki pada tahun 2015 maupun tahun 2016 selama 9 bulan, sedangkan untuk bayi perempuan mengalami peningkatan dari 10 bulan menjadi 11 bulan pada tahun 2016.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan

Gambar 2.3 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap di Kota Baubau, 2016





KESEHATAN DAN GIZI

menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2015 dan 2016, mayoritas balita yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 90 persen. Bila dilihat persentase jumlah balita yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Balita yang mendapat imunisasi BCG menurun dari 99,13 persen menjadi 90,20 persen pada tahun 2016. Balita yang mendapat imunisasi DPT mengalami penurunan dari 95,82 persen menjadi 85,49 persen ditahun 2016. Begitu pula balita yang mendapat imunisasi Polio, Campak dan Hepatitis B juga mengalami penurunan masing – masing dari 95,52 persen, 90,10 persen dan 94,88 persen menjadi 89,67 persen, 74,44 persen serta 86,86 persen di tahun 2016.

Tabel 2.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Baubau, 2015 -2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Imunisasi	Perkotaan	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
BCG	99,13	90,20
DPT	95,82	85,49
Polio	95,52	89,67
Campak	90,10	74,44
Hepatitis B	94,88	86,86

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan



Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 68,59 persen pada tahun 2015 menjadi 91,27 persen di tahun 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran tenaga kesehatan khususnya dokter kandungan dan bidan sebagai penolong persalinan. Penolong persalinan yang dilakukan oleh Dokter kandungan dan bidan selama tahun 2015-2016 mengalami peningkatan masing-masing dari 9,31 persen dan 59,28 persen menjadi 12,79 persen dan 77,78 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi penurunan pada tahun 2016, dari 29,53 persen ditahun 2015 menjadi 8,73 persen.



2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan di Kota Baubau, 2015 - 2016

Penolong Persalinan	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	68,59	91,27
- Dokter Kandungan	9,31	12,79
- Dokter Umum	0,00	0,70
- Bidan/Perawat	59,28	77,78
Bukan Tenaga Kesehatan	31,41	8,73
- Dukun Bayi	29,53	8,73
- Lainnya	1,88	0,00

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Di Kota Baubau, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang dominan menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Baubau, pada tahun 2016 terdapat 53 bidan dan 176 perawat yang tersebar pada 17 puskesmas.



Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Baubau, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tempat Berobat	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan (%)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	14,77	4,85
Praktek Dokter/Bidan	26,43	21,15
Klinik/Praktek Dokter Bersama	6,17	6,37
Puskesmas/ Pustu	55,89	67,24
UKBM*	0,55	0,74
Pengobatan Tradisional	1,04	1,07
Lainnya	0,97	1,16
% penduduk yang berobat jalan	44,27	47,10

*) UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu & Balai Pengobatan

Pada Tabel 2.7 tergambar bahwa telah terjadi peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tentang kesehatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Persentase penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015, dari 44,27 persen menjadi 47,10 persen di tahun 2016. Hal ini seiring dengan meningkatnya kepemilikan jaminan kesehatan seperti BPJS yang menentukan rujukan tempat berobat.



KESEHATAN DAN GIZI

Tahun 2015 -2016 Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi dari 55,89 persen menjadi 67,24 persen. Sementara itu, penduduk yang berobat ke rumah sakit dan praktek dokter/bidan mengalami penurunan.

Persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 dari 14,77 persen menjadi 4,85 persen pada tahun 2016. Sedangkan persentase penduduk yang berobat jalan di praktek dokter/bidan berkurang dari 26,43 persen menjadi 21,15 persen pada tahun 2016.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 dalam hal meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran minimal 1 puskesmas tiap kecamatan yang terakreditasi dan minimal 1 RSUD yang terakreditasi di setiap kab/kota.

Di Kota Baubau terdapat 2 puskesmas pada setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Wolio dan Kecamatan Betoambari yang memiliki 3 puskesmas. Sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah/swasta sebanyak 4 unit yang tersebar di Ke. Murhum dan Kec. Wolio yang merupakan wilayah perkotaan.



Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kota Baubau, 2016

Puskesmas	Tenaga Kesehatan/Health Personnel			
	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas				
1. Katobengke	3	12	5	1
2. Sulaa	3	7	4	-
3. Waborobo	2	5	3	-
4. Wajo	3	20	2	3
5. Melai	1	9	4	1
6. Bone-Bone	2	12	3	1
7. Wameo	2	13	2	2
8. Wolio	3	14	1	1
9. Bataraguru	2	13	5	-
10. BWI	2	15	4	-
11. Liwuto	3	8	2	1
12. Kadolomoko	2	14	5	1
13. Kampeonaho	1	5	4	-
14. Bungi	3	4	2	1
15. Sorawolio	3	9	1	1
16. Lakolagou	2	6	4	1
17. Lowu - lowu	2	10	2	1
Jumlah	39	176	53	15

Dari data jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Baubau, diharapkan tujuan dari kementerian kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat seperti menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya persentase BBLR, meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan kegiatan promotif dan preventif serta meningkatnya upaya perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.

Pendidikan



3



PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah



diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru serta Rasio Murid Kelas.

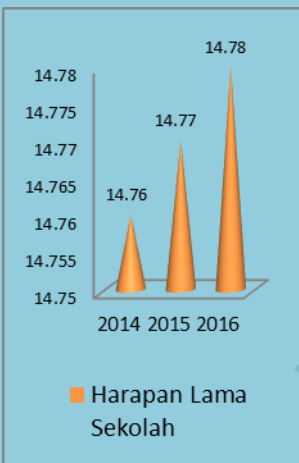
Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.



Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah Penduduk di Kota Baubau, 2014-2016



pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Tenggara, tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun keatas.



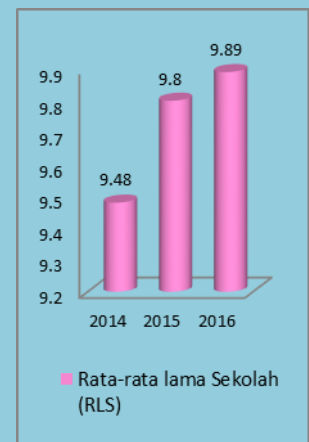
Secara tidak langsung, ada hubungan keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Baubau pada tahun 2015 dan 2016 relatif sama, dari 14,77 tahun menjadi 14,78 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D2. Kenaikan HLS dapat menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di suatu wilayah.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Baubau 2014-2016





PENDIDIKAN

RLS di Kota Baubau pada tahun 2016 tercatat 9,89 tahun. Ini berarti selama tahun 2016, rata-rata penduduk Kota Baubau usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas 1). Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan tahun 2015, yang mencapai 9,80 tahun. Meskipun terjadi kenaikan RLS pada tahun 2016 tetapi dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berbeda bila dibandingkan tahun 2015.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, artinya dengan anggapan bahwa pada usia 25 penduduk diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Baubau, 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,76	14,77	14,78
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,48	9,80	9,89

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang



pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2015 - 2016

Tingkat Pendidikan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah SD	14,29	12,44
SD/MI	13,72	25,30
SMP/MTS	18,75	10,40
SMA/SMK/MA	35,40	32,84
Diploma I s.d III	4,01	3,74
Diploma IV/S1	13,01	14,40
S2/ S3	0,82	0,88

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2016 penduduk Kota Baubau usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 51,86 persen dan mayoritas penduduk Kota Baubau menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Hal ini berarti program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah di Kota Baubau berhasil. Bila diamati pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2016 terjadi penurunan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah dari 14,29 persen di tahun 2015 menjadi



PENDIDIKAN

12,44 persen. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SMP/MTS, SMA/SMK/MA, Diploma I s.d IV pada tahun 2016 juga mengalami penurunan masing-masing dari 18,75 persen , 35,40 persen, dan 4,01 persen menjadi 10,40 persen, 32,84 persen serta 3,74 persen.

Bila dibandingkan dengan data tahun 2015 terjadi peningkatan penduduk yang menamatkan SD/MI, dari 13,72 persen menjadi 25,30 persen di tahun 2016. Penduduk yang menamatkan Diploma IV/S1 dari 13,01 persen menjadi 14,40 persen serta penduduk yang menamatkan S2/3 dari 0,82 persen menjadi 0,88 persen di tahun 2016. Hal ini berarti kesadaran penduduk tentang pentingnya pendidikan sudah mengalami peningkatan.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimilik dan Jenis Kelamin, 2016.

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki - laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah SD	11,21	13,64	12,44
SD/MI	25,16	25,43	25,30
SMP/MTS	11,91	8,94	10,4
SMA/SMK/MA	33,94	31,74	32,84
Diploma I s.d III	1,92	5,53	3,74
Diploma IV/S1	14,63	14,19	14,40
S2/ S3	1,23	0,53	0,88
Total	100	100	100



Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 3.4 menyajikan data Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni penduduk di Kota Baubau. Pada tahun 2016 sekitar 0,20 persen penduduk usia 7-12 tahun dan 3,32 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun penduduk yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 20,99 persen. Tabel 3.4 juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki usia 13-15 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan APS perempuan, sedangkan APS penduduk laki-laki usia 16-18 tahun lebih tinggi



dari perempuan. Hal ini berarti penduduk laki-laki usia 16-18 tahun lebih banyak yang bersekolah daripada penduduk perempuan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Baubau Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7-12tahun	99,59	100,00	99,80
13-15tahun	93,71	100,00	96,68
16-18tahun	82,95	74,52	79,01
APM			
- SD/MI	99,59	100,00	99,80
- SMP/MTs	76,04	96,19	85,56
- SMA/SMK/MA	70,40	72,68	71,47

Pada tahun 2016 sekitar 0,20 persen penduduk usia 7-12 tahun dan 3,32 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah, sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun penduduk yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 20,99 persen. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki usia 13-15 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan APS perempuan, sedangkan APS penduduk



laki-laki usia 16-18 tahun lebih tinggi dari perempuan. Hal ini berarti penduduk laki-laki usia 16-18 tahun lebih banyak yang bersekolah daripada penduduk perempuan.

Pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA APM perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan APM laki-laki.

Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu. Secara umum APM SD sebesar 99,80 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 95,24 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 65,73 persen pada tahun 2015 menjadi 85,56 persen pada tahun 2016. APM tingkat SMA meningkat dari 68,87 persen naik menjadi 71,47 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA untuk perempuan pada tahun 2016 lebih tinggi dibanding laki-laki, sedangkan pada tahun 2015 APM pada tingkat pendidikan SMA untuk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui



kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas, 2013/2014-2016/2017 Kota Baubau

Tahun	Rasio Murid-Guru		
	SD&MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2013/2014	9	8	10
2014/2015	18	6	6
2015/2016	13	10	11
2016/2017	35	10	9

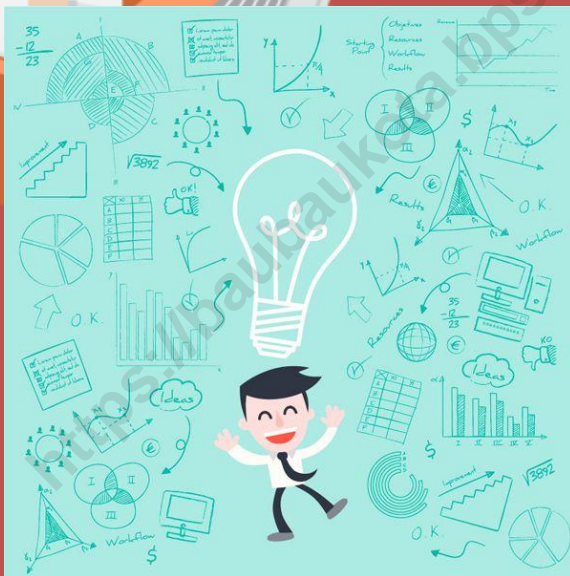
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Depag



Selama tahun ajaran 2013/2014 hingga 2016/2017 Rasio Murid-Guru sangat berfluktuasi. Pada tahun 2015/2016 Rasio Murid-Guru SD tercatat sebesar 13 kemudian naik menjadi 34 pada tahun ajaran 2016/2017. Hal ini berarti seorang guru SD bertanggung jawab untuk mengajar 34 siswa. Rasio Murid-Guru untuk jenjang pendidikan SMP selama tahun ajaran 2015/2016 – 2016/2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 10. Sedangkan rasio Murid-Guru untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2016/2017 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun ajaran 2015/2016 dari 11 menjadi 9.

KETENAGAKERJAAN

4





Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2015 dan 2016. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus tahun 2015, TPAK Kota Baubau sebesar 66,40 persen, hal ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 66 orang yang aktif secara ekonomi (tersedia untuk memproduksi barang dan jasa). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, TPAK Kota Baubau pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,26 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK Laki-laki dan TPAK perempuan juga mengalami peningkatan di tahun 2015. TPAK laki-laki dari 38,81 persen pada tahun 2014 naik menjadi 78,92 persen pada tahun 2015, sedangkan TPAK perempuan dari 51,78 persen pada tahun 2014 menjadi 54,66 persen pada tahun 2015 atau naik sebesar 2,88 persen. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk aktif mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

TPAK penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas pada tahun 2015 lebih tinggi dari pada TPAK perempuan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih aktif secara ekonomi dalam

Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau 2014-2015





memproduksi barang dan jasa dibandingkan penduduk perempuan, mengingat tanggung jawab penduduk laki-laki adalah sebagai kepala keluarga.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau Menurut Jenis Kelamin, 2014 - 2015

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki - laki	38,81	78,92	5,00	6,07
Perempuan	51,78	54,66	9,50	8,65
Total	64,37	66,40	6,79	7,17

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPT pada tahun 2014, dari 6,79 persen menjadi 7,17 persen atau meningkat 0,38 persen. TPT tahun 2015 sebesar 7,17 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk Kota Baubau berusia 15 tahun ke atas yang bersedia untuk memproduksi barang dan jasa sebanyak 7 orang, dimana 7 orang itu adalah pengangguran.

Bila dilihat dari jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki tahun 2015 sebesar 5 persen dan TPT penduduk perempuan sebesar 9,50 persen atau dengan kata lain TPT laki-laki lebih rendah dari pada perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

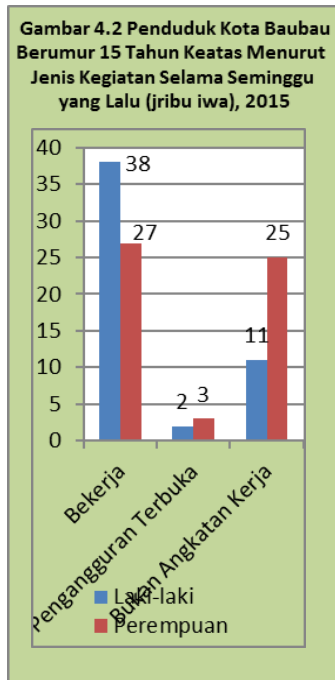


penduduk laki-laki lebih aktif secara ekonomi daripada perempuan. Tingkat Pengangguran tahun 2016 menggambarkan kondisi yang sama hanya saja nilai TPT laki-laki mengalami peningkatan dari 5 persen pada tahun 2015 menjadi 6,07 persen di tahun 2016, sedangkan TPT penduduk perempuan mengalami penurunan dari 9,50 persen menjadi 8,65 persen. Penurunan angka TPT perempuan tersebut berarti terjadi kenaikan penduduk perempuan yang bekerja.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Hasil Sakernas 2015 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 5.040 orang pengangguran. Dimana TPT tertinggi terjadi pada penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan Akademi, sedangkan TPT terendah pada penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD dan tamat SD. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak lulusan SMA dan Universitas yang





menganggur daripada penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD dan tamat SD yakni sebanyak 43,45 persen atau 2.190 orang lulusan SMA dan 35,58 atau 1.793 orang lulusan universitas. Untuk lebih jelasnya TPT penduduk Kota Baubau dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Baubau Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	-
Tidak/Belum Tamat SD	-
SD	-
SMP	2,86
SMA	43,45
SMK	15,87
Diploma I/II/III dan Akademi	2,24
Universitas	35,58
Total	100

Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa- jasa



(perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Secara umum persentase penduduk yang bekerja pada kategori lapangan usaha industri pada Agustus 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,02 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 yaitu dari 15,29 persen menjadi 18,31 persen, sedangkan pada kelompok usaha yang lain (Pertanian dan Jasa – jasa) persentase penduduk yang bekerja pada berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2014-2015

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Kelompok Usaha	Peran	
	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Pertanian (A)	13,35	12,46
Industri (M)	15,29	18,31
Jasa-Jasa (S)	71,36	69,23

Catatan :Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Cakupan lapangan usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.

Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.



Penurunan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPK) di Kota Baubau khususnya di sektor pertanian dan jasa-jasa. Peran penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 13,35 persen menjadi 12,46 persen. Begitupula pada sektor jasa-jasa terjadi penurunan dari 71,36 persen menjadi 69,23 persen. Dari Tabel 4.3 tergambar bahwa mayoritas penduduk di Kota Baubau bekerja di sektor jasa-jasa.

<https://baubaukota.bps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5

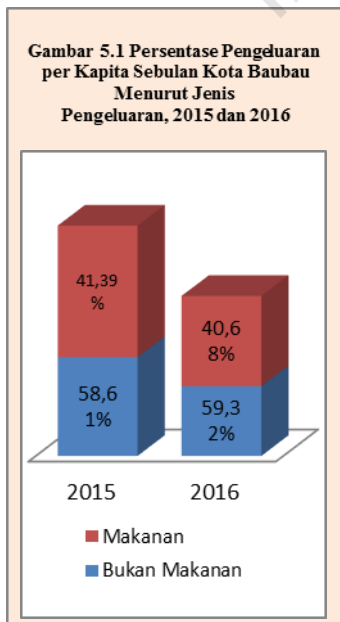


<https://baubau.com/bps.go.id>



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga



Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan

penduduk dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kota Baubau, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	285 487	368 999	41,39	40,68
Bukan Makanan	404 301	538 141	58,61	59,32
Perumahan	253 356	316 129	62,67	58,74
Barang dan Jasa	49 693	106 916	12,29	19,87
Pakaian	21 417	36 479	5,30	6,78
Barang Tahan Lama	31 968	41 750	7,90	7,76
Lainnya	47 867	36 867	11,84	6,85
Jumlah	689 788	907 140	100,00	100,00

Selama periode 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 689.788,- menjadi Rp 907.140,-. Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 41,39 persen pada tahun 2015 menjadi 40,68 persen pada tahun 2016. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan meningkat dari 58,61 persen menjadi 59,32 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada konsumsi pakaian dan



konsumsi barang dan jasa, sedangkan pengeluaran yang mengalami penurunan terjadi pada perumahan, barang tahan lama dan lainnya. Pengeluaran lainnya disini meliputi pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, pajak pemakaian dan premi asuransi serta keperluan pesta. Penurunan pengeluaran yang paling besar terjadi pada pengeluaran perumahan dan lainnya masing-masing dari 62,67 persen dan 11,84 persen di tahun 2015 menjadi 58,74 persen dan 6,85 persen pada tahun 2016.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 29,25 persen dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 285.487,- menjadi Rp. 368.999,- perkapita sebulan.

Pada tahun 2016 Tabel 5.2 menyajikan data rata – rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makan dan non makanan menurut golongan pengeluaran. Pada tahun 2016 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk antara 100 ribu sampai 499 ribu lebih banyak digunakan untuk konsumsi makanan daripada untuk non makanan, sedangkan untuk golongan pengeluaran antara 500 ribu rupiah sampai diatas 1 juta rupiah rata-rata sebagian besar digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

Secara umum pada tahun 2015 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar 258 ribu rupiah digunakan untuk konsumsi makanan dan sebesar 321 ribu rupiah untuk konsumsi bukan makanan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 42,57 persen pada pengeluaran untuk makanan atau dari 258 ribu rupiah pada tahun 2015 menjadi 368 ribu rupiah pada tahun 2016. Sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan terjadi kenaikan sebesar 67,62 persen atau dari 321 ribu rupiah menjadi 538 ribu rupiah.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah), 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Golongan Pengeluaran per Kapita	Makanan		Bukan Makanan	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 100 000	76,88	0	21,27	0
100 000 - 149 999	0	58,29	0	60,95
150 000 - 199 999	104,57	93,69	71,39	70,16
200 000 - 299 999	161,39	134,38	97,23	122,91
300 000 - 499 999	227,24	199,97	158,68	193,60
500 000 - 749 999	284,53	274,49	335,33	326,74
750 000 - 999 999	376,95	399,63	477,36	398,93
> 1 000 000	580,13	642,66	1 086,06	1 091,79
Total	258,81	368,99	321,04	538,14

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



6

<https://b...kota...id>

<https://baubaukota.bps.go.id>



Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik peran maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan



penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, serta memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2016, sudah hampir seluruh rumah tangga di Kota Baubau bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Pada tahun 2016, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,59 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 99,47 persen.

Pada tahun 2015 sudah hampir seluruh rumah tangga di Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Sementara itu, persentase rumah tangga di perdesaan yang bertempat tinggal di rumah berlantai tanah lebih besar dari pada dipertanian..

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2015 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 95,32persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 97,86 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu dari 95,79 persen di tahun 2015 menjadi 96,37 persen pada tahun 2016.



Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Baubau, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	99,47	99,59
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	95,32	97,86
Dinding terluastembok dan kayu (%)	95,32	96,37

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Pada tahun 2015 dan 2016 sebagian besar rumah tangga bertempat tinggal pada bangunan yang memiliki luas lantai



antara 50 s.d 99 m². Pada tahun 2016 terjadi penurunan persen-

tase jumlah rumah tangga yang mendiami luas lantai bangunan tempat tinggal ukuran 20 s.d 49 m² dari 33,50 persen menjadi 31,90 persen, luas lantai ukuran 50 s.d 99 m² dari 38,75 persen menjadi 38,20 persen, luas lantai 100 s.d 149 m² dari 13,94 persen menjadi 12,74 persen. Sedangkan peningkatan persentase jumlah rumah tangga terjadi pada rumah tangga yang mendiami bangunan dengan luas ≤ 19 m² yaitu dari 6,42 persen menjadi 8,79 persen, luas lantai bangunan tempat tinggal ≥ 150 m² dari 7,39 persen menjadi 8,37 persen.

Mayoritas rumah tangga di Kota Baubau pada tahun 2015 dan 2016 tinggal pada bangunan tempat tinggal yang memiliki luas 50-99 m².

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Luas Lantai Perkapita, 2015- 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m ²)	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
≤ 19 m ²	6,42	8,79
20-49 m ²	33,50	31,9
50-99 m ²	38,75	38,2
100-149 m ²	13,94	12,74
≥ 150 m ²	7,39	8,37

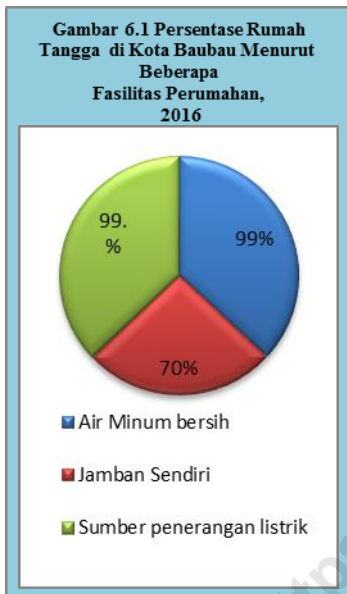
Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih



merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang

cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.



Pada tahun 2016, rumah tangga di Kota Baubau yang telah mengakses air bersih, yaitu air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 m, mencapai 99 persen. Persentase tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan data tahun 2015 yang mencapai 97,99 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 92,18 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015 (97,18 persen).

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015, 98,19 persen rumah tangga di Kota Baubau telah menikmati fasilitas penerangan listrik. Angka tersebut meningkat pada tahun 2016 yang



mencapai 99,40.

Tabel. 6.3 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Air minum bersih ¹⁾	97,99	99,00
Jamban sendiri	81,26	69,97
Jamban dengan tangki septik, SPAL	97,18	92,18
Sumber penerangan Listrik	98,19	99,40

Catatan :¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) \geq 10 m

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015 - 2016

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Peran	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	74,61	69,26
Kontrak/Sewa	9,62	10,02
Bebas Sewa/Rumah Dinas/Lainnya	15,78	20,72

Berdasarkan hasil Susenas 2016, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 69,6 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 74,61 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebesar 30,74 persen yang terdiri dari 10,02 persen kontrak/sewa, 20,72 persen bebas sewa/rumah dinas/lainnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kota Baubau memiliki rumah sendiri dan peningkatan persentase kotraan/sewa dan bebas sewa/rumah dinas/lainnya karena adanya migrasi penduduk dari tempat lainnya, mengingat posisi Kota Baubau yang sangat strategis karena dikelilingi oleh beberapa kabupaten, fasilitas umum yang memadai, serta sarana dan prasarana transportasi yang lengkap.

KEMISKINAN



7

<https://b...ta.bps.go.id>



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Baubau. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomiyang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Baubau mengalami penurunan selama periode 2012-2016. Tahun 2012, jumlah



KEMISKINAN

penduduk miskin sebesar 14,40 ribu jiwa atau 10,03 persen dari jumlah seluruh penduduk di Kota Baubau pada tahun tersebut. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 14,10 ribu jiwa atau 9,25 persen dari jumlah penduduk tahun 2014. Tahun 2015 tercatat jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14,29 ribu jiwa atau 9,24 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2015. Penduduk miskin kembali turun pada tahun 2016, menjadi 13,87 ribu jiwa atau 8,79 dari total penduduk pada tahun 2016.

**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau,
2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2012	14,40	10,03
2013	15,10	10,11
2014	14,10	9,25
2015	14,29	9,24
2016	13,87	8,76

Catatan : Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk



miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Baubau mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2012-2016 dari Rp. 251.070,- menjadi Rp. 291.873,- perkapita/bulan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P_1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai P_1 yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat.

P_1 pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015 dari 1,51 menjadi 1,21 hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2015 -2016

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan)	274 066	291 873
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	1,51	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,41	0,32

Sumber : BPS

POOR

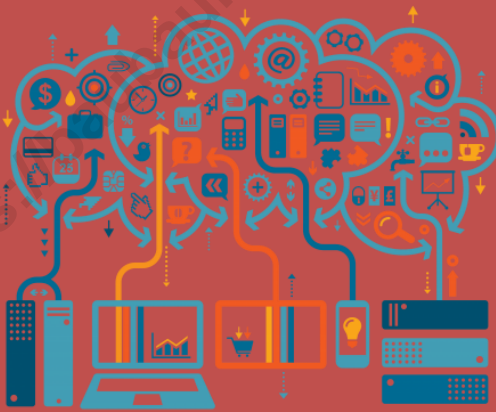
RICH



KEMISKINAN

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 tahun 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015 dari 0,41 menjadi 0,31. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin mengecil. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Baubau pada tahun 2016 cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil, hal ini mengindikasikan bahwa kelompok penduduk miskin mulai menerima pendapatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Disaat yang sama, besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan juga mengalami penurunan.

LAMPIRAN





LAMPIRAN

I

(1) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2013	2014	2015	2016	2014	2015
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Betoambari	17 286	18 023	18 433	18 844	2,27	2,23
Murhum	20 447	21 311	21 793	22 275	2,26	2,21
Batupoaro	27 483	28 648	29 291	29 941	2,24	2,22
Wolio	40 312	41 948	42 862	43 782	2,18	2,18
Kokalukuna	17 767	18 512	18 929	19 342	2,25	2,15
Sorawolio	7 561	7 853	8 025	8 195	2,19	2,12
Bungi	7 533	7 848	8 030	8 210	2,32	2,24
Lea-lea	7 038	7 342	7 514	7 682	2,34	2,24
Baubau	145 427	151 485	154 877	158 271	2,24	2,19

LAMPIRAN



I

(2) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kabupaten/	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2015			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Betoambari	9 309	9 535	18 844	0,98
Murhum	10 869	11 406	22 275	0,95
Batupoaro	14 561	15 380	29 941	0,94
Wolio	22 002	21 780	43 782	1,01
Kokalukuna	9 586	9 756	19 342	0,98
Sorawolio	4 083	4 112	8 195	0,99
Bungi	4 065	4 145	8 210	0,98
Lea-lea	3 726	3 956	7 682	0,94
Baubau	78 201	80 070	158 271	0,97



LAMPIRAN

I

(3) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Persentase Terhadap Luas Baubau	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Betoambari	11,91	646	587	600	11,89	11,90	11,91
Murhum	14,07	4449	3 578	3 658	14,06	14,07	14,07
Batupoaro	18,92	18 482	17 435	17 822	18,91	18,91	18,92
Wolio	27,67	2 420	1 277	1 304	27,69	27,67	27,67
Kokalukuna	12,22	1 961	1 123	1 148	12,22	12,22	12,22
Sorawolio	5,18	94	72	74	5,18	5,18	5,18
Bungi	5,19	164	136	139	5,18	5,18	5,19
Lea-lea	4,85	253	225	230	4,85	4,85	4,85
Baubau	100,00	685	528	540	100	100	100,

LAMPIRAN



I

(4) Indikator Kependudukan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/	Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama (%), 2016				Jumlah
	< 16	17-18	19-20	21 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Buton	14,10	20,54	28,24	37,13	100,00
Muna	9,23	22,08	25,52	43,17	100,00
Konawe	16,39	29,75	20,74	33,12	100,00
Kolaka	19,74	23,85	19,33	37,08	100,00
Konawe Selatan	22,97	26,65	21,95	28,42	100,00
Bombana	21,99	21,98	20,57	35,47	100,00
Wakatobi	12,89	26,12	24,57	36,42	100,00
Kolaka Utara	21,24	25,10	20,95	32,71	100,00
Buton Utara	14,75	25,49	22,90	36,85	100,00
Konawe Utara	18,48	21,48	27,41	32,63	100,00
Kolaka Timur	18,87	23,73	20,60	36,80	100,00
Konawe Kepulauan	16,77	26,14	22,64	34,46	100,00
Kendari	8,40	16,06	20,39	55,15	100,00
Baubau	9,16	20,54	19,55	50,74	100,00
Sulawesi Tenggara	15,68	23,10	22,41	38,81	100,00



LAMPIRAN

II

(1) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/	Angka Harapan Hidup (tahun)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Buton	67,17	67,23
Muna	69,76	69,77
Konawe	69,45	69,48
Kolaka	69,90	69,97
Konawe Selatan	69,87	69,93
Bombana	67,62	67,72
Wakatobi	69,49	69,54
Kolaka Utara	69,49	69,62
Buton Utara	70,36	70,37
Konawe Utara	68,59	68,64
Kolaka Timur	71,51	71,58
Konawe Kepulauan	67,86	67,87
Muna Barat	69,76	69,78
Buton Tengah	67,17	67,17
Buton Selatan	67,17	67,17
Kendari	72,94	72,98
Baubau	70,43	70,47
BAUBAU	70,44	70,46

LAMPIRAN



III

(2) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/	Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenisnya (%), 2016				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	92,50	86,00	92,94	77,55	85,39
Muna	93,09	91,48	92,44	78,68	91,30
Konawe	94,02	91,59	94,11	81,06	92,70
Kolaka	87,33	80,16	85,09	76,09	81,92
Konawe Selatan	95,74	89,65	94,10	81,74	91,59
Bombana	86,11	82,98	87,21	67,46	82,31
Wakatobi	77,58	77,20	80,00	64,95	71,61
Kolaka Utara	84,03	76,44	81,90	62,77	74,85
Buton Utara	85,03	82,49	87,32	72,11	81,65
Konawe Utara	87,95	84,98	89,67	63,95	85,40
Kolaka Timur	91,65	89,29	91,50	75,58	95,70
Konawe Kepulauan	84,37	84,22	91,80	58,46	85,56
Kendari	90,44	82,45	90,46	69,16	84,91
Baubau	90,20	85,43	89,67	74,44	89,33
Sulawesi Tenggara	90,54	85,86	90,37	74,56	86,88



LAMPIRAN

II

(3) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir (%), 2016				
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lainnya	Dukun Tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	12,20	60,00	-	27,80	-
Muna	14,08	79,44	-	6,48	-
Konawe	14,39	67,74	-	17,87	-
Kolaka	13,43	74,54	0,95	11,08	-
Konawe Selatan	10,22	80,36	-	9,42	-
Bombana	10,54	64,06	-	24,17	-
Wakatobi	10,31	67,98	-	20,80	0,91
Kolaka Utara	19,84	62,62	-	15,32	2,22
Buton Utara	7,29	72,96	0,95	18,80	-
Konawe Utara	7,34	74,13	-	17,40	1,12
Kolaka Timur	6,76	89,08	-	4,16	-
Konawe Kepulauan	3,54	64,12	-	32,35	-
Kendari	44,51	51,67	1,65	2,17	-
Baubau	13,49	75,98	1,80	8,73	-
Sulawesi Tenggara	13,59	64,56	0,35	20,91	0,59

LAMPIRAN



(1) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Buton	13,22	6,82
Muna	12,89	13,20
Konawe	12,95	12,96
Kolaka	11,91	12,37
Konawe Selatan	11,90	12,16
Bombana	11,79	11,80
Wakatobi	12,82	12,87
Kolaka Utara	11,64	11,92
Buton Utara	12,27	12,72
Konawe Utara	11,65	11,93
Kolaka Timur	11,06	11,33
Konawe Kepulauan	10,46	10,94
Muna Barat	11,62	11,64
Buton Tengah	12,30	12,31
Buton Selatan	12,53	12,54
Kendari	16,04	16,05
Baubau	14,77	14,78
Sulawesi Tenggara	13,07	13,24



LAMPIRAN



(2) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (HLS) (tahun)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Buton	7,06	6.829
Muna	7,33	7,66
Konawe	8,59	8,60
Kolaka	8,18	8,19
Konawe Selatan	7,70	7,71
Bombana	7,51	7,52
Wakatobi	7,69	7,70
Kolaka Utara	7,48	7,49
Buton Utara	7,92	7,92
Konawe Utara	8,24	8,41
Kolaka Timur	6,39	6,65
Konawe Kepulauan	8,71	8,80
Muna Barat	6,23	6,24
Buton Tengah	6,79	7,01
Buton Selatan	6,55	6,81
Kendari	11,66	11,67
Baubau	9,80	9,89
Sulawesi Tenggara	8,18	8,32

LAMPIRAN



(3) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	98,30	100,00	90,18	94,72	82,51	81,06
Muna	100,00	98,75	96,96	95,17	74,82	90,30
Konawe	99,48	98,68	94,00	85,28	65,06	70,77
Kolaka	99,46	99,22	93,39	94,81	43,09	63,80
Konawe Selatan	97,28	98,68	91,95	91,78	64,18	64,10
Bombana	98,54	98,72	93,06	79,01	47,06	64,18
Wakatobi	100,00	98,65	100,00	96,82	79,06	76,15
Kolaka Utara	98,52	100,00	93,65	79,86	64,46	55,60
Buton Utara	99,07	98,66	96,61	99,16	79,62	83,06
Konawe Utara	98,38	100,00	94,03	94,03	83,10	71,49
Kolaka Timur	100,00	100,00	92,94	92,00	64,80	69,59
Konawe Kepulauan	98,09	100,00	97,77	97,18	68,50	66,23
Kendari	99,04	99,44	97,91	93,06	64,64	69,85
Baubau	98,27	99,59	94,40	93,71	76,99	79,01
Sulawesi Tenggara	98,88	99,24	94,37	91,39	68,16	72,67



LAMPIRAN



(4) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	99,95	99,06	96,85	99,72	83,50	80,75
Muna	99,44	98,06	91,14	96,32	81,69	91,51
Konawe	99,22	100,00	90,17	95,85	75,90	73,16
Kolaka	100,00	98,60	88,26	96,47	80,40	65,97
Konawe Selatan	100,00	100,00	90,99	98,34	73,52	60,91
Bombana	100,00	99,19	90,62	92,52	57,07	71,27
Wakatobi	100,00	97,86	96,54	97,32	80,15	77,45
Kolaka Utara	99,17	100,00	97,05	90,70	74,37	63,97
Buton Utara	99,21	99,02	98,14	91,86	83,63	88,53
Konawe Utara	98,26	96,23	97,27	92,76	71,35	70,87
Kolaka Timur	99,35	100,00	91,89	97,72	65,70	74,78
Konawe Kepulauan	100,00	100,00	99,06	98,30	74,02	69,43
Kendari	100,00	100,00	95,86	95,64	80,16	57,07
Baubau	98,85	100,00	93,41	100,00	72,74	74,52
Sulawesi Tenggara	99,62	99,32	92,95	96,46	76,46	71,59

LAMPIRAN



(5) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	99,07	99,55	93,34	97,73	82,94	81,06
Muna	99,74	98,42	93,93	95,74	78,33	90,30
Konawe	99,36	99,34	91,95	90,34	71,34	70,77
Kolaka	99,41	98,92	90,56	95,54	59,72	63,80
Konawe Selatan	98,56	99,34	91,50	94,42	69,92	64,10
Bombana	99,21	98,94	91,86	85,69	52,36	64,18
Wakatobi	100,00	98,27	98,11	97,14	79,59	76,15
Kolaka Utara	98,85	100,00	95,28	85,09	68,93	55,60
Buton Utara	98,80	98,85	97,35	95,83	81,73	83,06
Konawe Utara	98,32	98,35	95,47	93,38	77,37	71,49
Kolaka Timur	99,68	100,00	92,50	94,62	65,28	69,59
Konawe Kepulauan	98,99	100,00	98,37	97,76	71,04	66,23
Kendari	99,48	99,69	97,07	94,46	72,85	69,85
Baubau	98,23	99,80	93,87	96,68	75,01	79,01
Sulawesi Tenggara	99,18	99,28	93,67	93,91	72,42	72,67



LAMPIRAN



(6) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD		SMP		SMA	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	94,82	93,64	81,69	72,92	70,40	66,62
Muna	93,52	98,75	80,12	81,94	64,50	72,03
Konawe	99,48	98,07	81,55	64,06	62,96	65,18
Kolaka	99,46	98,73	75,16	64,55	41,59	54,49
Konawe Selatan	91,77	90,21	81,51	69,59	55,33	65,91
Bombana	98,54	97,22	63,26	63,93	43,60	47,76
Wakatobi	100,00	93,62	90,81	75,65	61,80	54,13
Kolaka Utara	98,05	98,45	68,82	67,82	52,02	36,34
Buton Utara	98,44	92,92	89,03	86,67	63,91	50,21
Konawe Utara	90,52	92,07	62,58	71,14	66,42	53,11
Kolaka Timur	91,76	93,85	76,24	70,60	56,67	62,26
Konawe Kepulauan	89,47	90,18	62,60	84,86	53,61	50,48
Kendari	89,96	96,39	68,25	64,60	60,93	54,55
Baubau	98,27	99,59	68,83	76,04	67,64	70,40
Sulawesi Tenggara	94,92	95,75	76,09	70,79	59,78	60,47

LAMPIRAN



III

(7) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD		SMP		SMA	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	99,62	99,06	78,43	81,02	67,14	70,99
Muna	99,44	96,32	82,98	79,37	74,64	83,83
Konawe	99,22	98,25	64,15	79,19	75,90	71,17
Kolaka	93,34	97,83	71,55	72,02	73,40	54,37
Konawe Selatan	100,00	98,37	82,93	83,14	67,74	58,45
Bombana	93,12	87,43	75,62	83,92	53,04	66,80
Wakatobi	100,00	97,12	64,78	82,58	72,90	51,81
Kolaka Utara	99,17	96,20	82,61	83,67	68,56	57,93
Buton Utara	93,53	90,00	92,32	82,50	75,65	70,00
Konawe Utara	98,26	96,23	77,26	88,10	59,22	47,84
Kolaka Timur	90,85	94,35	65,32	79,79	49,67	74,78
Konawe Kepulauan	92,12	96,72	55,69	96,18	74,02	56,10
Kendari	100,00	98,87	68,29	70,53	45,31	55,41
Baubau	90,94	100,00	63,03	96,19	70,30	72,68
Sulawesi Tenggara	97,33	96,82	74,35	80,29	64,21	65,09



LAMPIRAN



(8) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD		SMP		SMA	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	97,08	99,06	78,43	81,02	67,14	70,99
Muna	96,29	96,32	82,98	79,37	74,64	83,83
Konawe	99,36	98,25	64,15	79,19	75,90	71,17
Kolaka	96,58	97,83	71,55	72,02	73,40	54,37
Konawe Selatan	95,63	98,37	82,93	83,14	67,74	58,45
Bombana	96,05	87,43	75,62	83,92	53,04	66,80
Wakatobi	100,00	97,12	64,78	82,58	72,90	51,81
Kolaka Utara	98,62	96,20	82,61	83,67	68,56	57,93
Buton Utara	96,25	90,00	92,32	82,50	75,65	70,00
Konawe Utara	94,49	96,23	77,26	88,10	59,22	47,84
Kolaka Timur	91,31	94,35	65,32	79,79	49,67	74,78
Konawe Kepulauan	90,72	96,72	55,69	96,18	74,02	56,10
Kendari	94,53	98,87	68,29	70,53	45,31	55,41
Baubau	94,48	100,00	63,03	96,19	70,30	72,68
Sulawesi Tenggara	96,06	96,82	74,35	80,29	64,21	65,09



IV

(1) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Tahun	TPAK (%) Kota Baubau	TPT (%) Kota Baubau
(1)	(2)	(3)
2013	65,6	8,66
2014	64,14	6,79
2015	66,40	7,17



LAMPIRAN

IV

(2) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Jenis Kelamin	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2015			Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Bukan Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	37 998	2 457	10 804	51 259
Perempuan	27 294	2 583	24 782	54 659
Laki-laki+ Perempuan	65 292	5 040	35 586	105 918



IV

(3) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/	4 062	4 075	8 137
Pertambangan dan Penggalian/	141	-	141
Industri	3 389	3 198	6 587
Bangunan	4 946	280	5 226
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	6 382	10 263	16 645
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	8 939	8 217	17 156
Lainnya /Others	10 139	1 261	11 400
Jumlah/<i>Total</i>	37 998	27 294	65 292



LAMPIRAN

VI

(1) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²), 2016					Jumlah
	<20	20-49	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	3,23	44,17	40,63	8,63	3,34	100,00
Muna	1,22	43,96	41,51	10,16	3,15	100,00
Konawe	0,45	16,50	47,82	24,34	10,89	100,00
Kolaka	1,30	31,43	42,39	13,87	11,02	100,00
Konawe Selatan	0,98	20,21	59,63	13,77	5,41	100,00
Bombana	1,06	31,61	48,70	13,34	5,29	100,00
Wakatobi	2,66	19,14	58,75	15,12	4,33	100,00
Kolaka Utara	0,67	31,09	42,62	15,87	9,75	100,00
Buton Utara	4,25	43,84	37,87	10,75	3,29	100,00
Konawe Utara	0,87	24,40	53,55	13,37	7,81	100,00
Kolaka Timur	2,47	20,07	45,89	17,22	14,35	100,00
Konawe Kepulauan	0,08	22,55	58,65	14,91	3,81	100,00
Kendari	22,27	21,44	26,61	16,18	13,49	100,00
Baubau	8,79	31,90	38,20	12,74	8,37	100,00
Sulawesi Tenggara	5,04	28,54	43,89	14,46	8,06	100,00



VI

(2) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016					
	Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	90,75	0,69	7,99	0,38	0,19	100,00
Muna	89,73	0,42	8,54	1,31	-	100,00
Konawe	93,06	2,42	4,52	-	-	100,00
Kolaka	86,39	3,03	6,58	3,84	0,16	100,00
Konawe Selatan	97,02	0,51	2,46	-	-	100,00
Bombana	91,25	0,29	7,45	1,00	-	100,00
Wakatobi	92,29	1,07	5,95	0,55	0,14	100,00
Kolaka Utara	89,55	1,52	7,06	1,86	-	100,00
Buton Utara	93,06	1,42	5,18	0,34	-	100,00
Konawe Utara	93,32	0,30	4,15	2,22	-	100,00
Kolaka Timur	94,38	3,06	2,56	-	-	100,00
Konawe Kepulauan	95,30	1,08	2,30	-	1,32	100,00
Kendari	62,86	30,05	6,41	0,41	0,27	100,00
Baubau	69,26	10,02	20,07	0,65	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	86,37	6,09	6,63	0,81	0,09	100,00



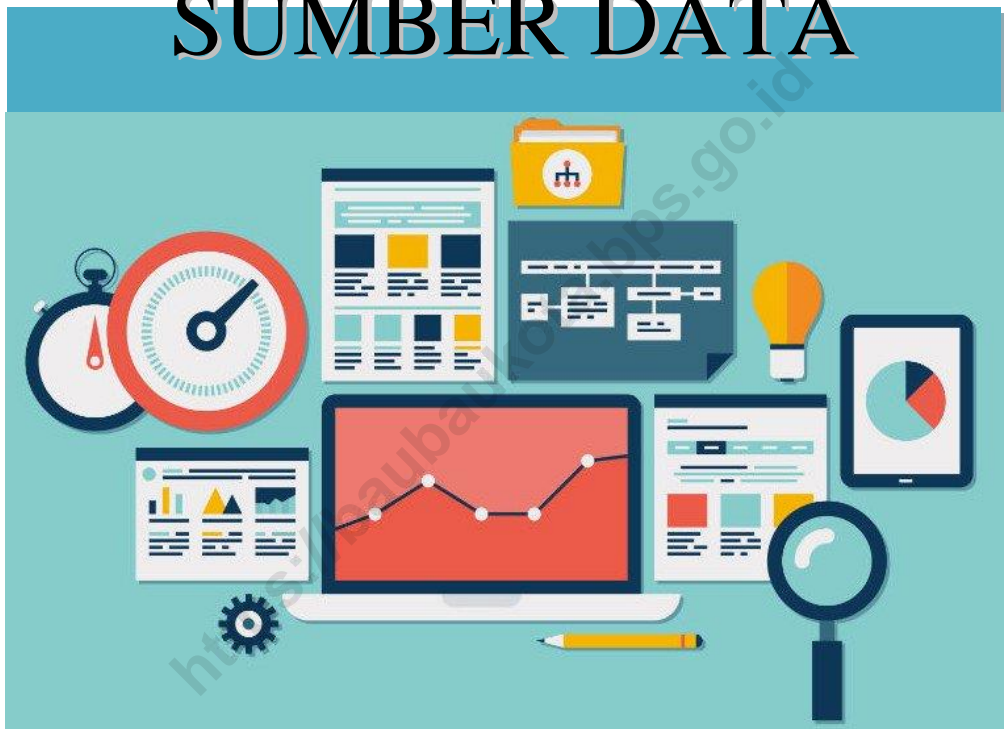
LAMPIRAN

VII

(1) Indikator Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	36,60	13,03	13,75	13,53	198 183	206 626
Muna	44,43	32,65	15,45	15,37	269 838	290 695
Konawe	37,14	38,14	16,09	16,09	241 617	260 264
Kolaka	27,21	28,56	14,68	15,05	292 370	320 897
Konawe Selatan	34,05	33,94	33,94	11,58	181 796	195 175
Bombana	20,73	22,04	12,55	13,06	246 908	266 717
Wakatobi	16,10	15,73	16,88	16,46	218 939	234 351
Kolaka Utara	23,07	24,32	16,53	17,11	256 680	388 041
Buton Utara	9,48	9,60	15,86	15,78	258 425	275 544
Konawe Utara	5,80	5,79	9,97	9,75	216 578	232 307
Kolaka Timur	28,22	28,52	15,57	15,71	291 862	314 387
Konawe Kepulauan	5,27	5,70	16,73	17,72	240 679	263 229
Muna Barat	-	12,32	-	-	-	287 403
Buton Tengah	-	12,33	-	-	-	215 822
Buton Selatan	-	10,75	-	-	-	205 287
Kendari	19,25	19,58	5,59	5,51	270 861	291 069
Baubau	14,27	13,87	9,24	8,81	274 066	291 873

SUMBER DATA





SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

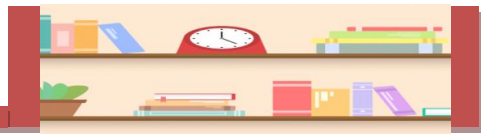
Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/madya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.



Sumber Data Lainnya


Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

<https://baubaukota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



 **BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BAUBAU**

Jl. Murhum No. 52 Baubau 93726 Telp. (0402)2821277

Homepage: <http://baubaukota.bps.go.id>

Email: bps7472@bps.go.id